PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

Jalan Pahlawan No. 22 Kode Pos 67126

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan **"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah"** (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja sesuai dengan target yang tercantum dalam sasaran Renstra 2021-2026 yaitu meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar serta terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021–2026, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Akhirnya kami berharap semoga dokumen **"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah"** Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ini dapat bermanfaat.

Pasuruan, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670316 198903 2 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP tahun 2025 memuat rencana, realisasi, capaian indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yang dicapai di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk ber-KTP elektronik sebesar 99,20%.
2. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran sebesar 100,00%.
3. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan sebesar 98,53%.
4. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga sebesar 47%.

Capaian realisasi kinerja tahun 2025 ini dapat dicapai dengan adanya inovasi layanan yang memudahkan warga dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta layanan jemput bola ke rumah warga, sekolah, dan tempat keramaian.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/lembaga lain.
3. Meningkatkan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Penjelasan Umum Organisasi 2

1.2.1 Isu Strategis 2

1.2.2 Dukungan SDM 3

1.2.3 Sarana Prasarana 3

1.2.4 Anggaran 4

1.3. Dasar Hukum 4

1.4. Sistimatika Laporan Kinerja 5

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025…… 6

1.6. Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024..... 6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 7

2.1. Tujuan dan Sasaran dan indikator 5 tahun TerakhirPerangkat Daerah 7

2.1.1 Strategi dan arah kebijakan 7

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025 9

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 11

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 21

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 22

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 22

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 23

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 26

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....34

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional..... 35

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan..... 35

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 36

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..... 37

3.2. Realisasi Anggaran 39

3.3 Inovasi 41

3.4 Penghargaan 44

BAB IV : PENUTUP 45

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.12. Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025) 4

Tabel 2.13. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun Periode 2021-2025 8

Tabel 2.14. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun Periode 2025-2030.....9

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 10

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025 12

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 12

Tabel 2.5. Program, Kegiatan, dan sub kegiatan 2025 13

Tabel 2.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 17

Tabel 2.7. Perubahan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan 2025 18

Tabel 3.1. Pengkategorian Capaian Kinerja..... 23

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 25

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja 27

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Sasaran 30

Tabel 3.5. Kemajuan Capaian Sasaran 35

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota..... 36

Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 36

Tabel 3.8. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 37

Tabel 3.9.. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 38

Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 41

Tabel 4.1. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi ……2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan memuat target kinerja dan anggaran yang direncanakan, serta hasil capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. LKjIP sebagai laporan kinerja untuk mengevaluasi dan menganalisa kinerja berdasarkan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yaitu meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar serta terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib,dan tidak *diskriminatif* dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pencapaian visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan yaitu Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”, pada misi IV “Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan kemampuan *berkreativitas*, *berinovasi* secara terus menerus dalam memanfaatkan faktor kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu penentuan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Pasuruan sebagai ukuran kinerja pencapaian perangkat daerah.

Inovasi yang berkelanjutan merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, gratis dan membahagiakan

masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

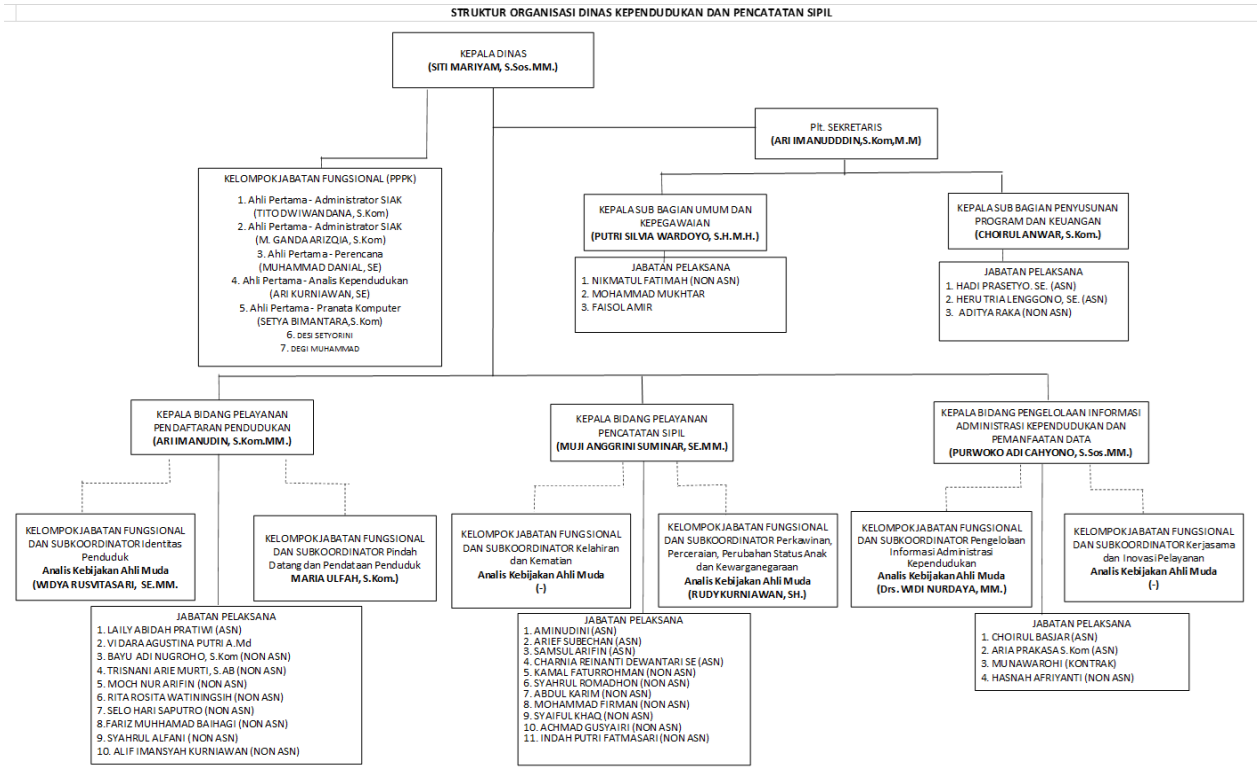
1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Perwujudan Kota Pasuruan sebagai layanan satu pintu sehari pasti jadi.
- Penerapan konsep smart city yang terpadu sebagai implementasi satu data Kota Pasuruan.
- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan



1.2.2 Dukungan SDM

Pegawai berdasarkan Status ASN dan Non ASN

No.	Data Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Gender ASN	17	11	28
2	Gender Non ASN	15	6	21
3	Disabilitas ASN	0	0	0
Total Pegawai				48

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Data Pegawai	ASN	Non ASN	ASN L	ASN P	NON L	NON P
1	ASN IJAZAH SD	0	0	0	0	0	0
2	ASN IJAZAH SMP	0	0	0	0	0	0
3	ASN IJAZAH SMA	6	12	3	3	9	3
4	ASN IJAZAH D3	2	0	0	2	0	0
5	ASN IJAZAH S1	11	9	10	2	6	3
6	ASN IJAZAH S2	9	0	4	4	0	0
Total		**28**	**21**	**17**	**11**	**15**	**6**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Data Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	ASN ESELON II	0	1	**1**
2	ASN ESELON III	2	1	**3**
3	ASN ESELON IV	1	1	**2**
4	ASN ESELON PENYETARAAN	1	2	**3**
5	ASN JFU	0	0	**0**
6	ASN JFT	0	0	**0**
7	PPPK	5	0	**5**
Total		**9**	**5**	**14**

1.2.3 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan di ruangan Kadis Terdapat beberapa sarana dan prasarana seperti Komputer, Printer, Ac, Proyektor, kursi dan meja Rapat , di ruangan Sekertariat Terdapat beberapa sarana dan prasarana seperti P.C unit, Printer, Laptop, AC ,Scanner,Mesin penghancur Kertas, di ruangan Pelayanan MPP Juga terdapat beberapa sarana dan prasarana seperti P.C unit, Laptop, Mesin Adm, Printer, AC, Scanner, Televisi, Ruang Tunggu yang nyaman untuk masyarakat, Tempat charge HP, CCTV, Ruang Laktasi (Ruang Menyusui), Kotak Pengaduan, Kursi Roda, Ruangan Tunggu Ber AC, dan Jalur Khusus Disabilitas.

1.2.4 Anggaran

Tabel 1.12

Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 6.325.742.596
APBD	Tahun n	Rp 5.504.559.295

1.3. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4. Sistimatika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 RealisasiAnggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Matriks Renstra (5 tahun)

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

1. **Rekomendasi :** Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja.

Tindaklanjut :

a. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja.

2. Rekomendasi : Menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Wali Kota sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tindaklanjut :

a. Laporan Kinerja tahun 2025 akan disampaikan kepada Wali Kota Pasuruan

1.6. Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024

Atas Kondisi tersebut Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- Menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- Menilai dan Memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang di hadapi berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Perangkat Daerah

Dalam Perencanaan kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yang Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat visi, misi dan program pembangunan dari kepala daerah terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan visi Kota Pasuruan yaitu Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”, pada misi IV “Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif” dengan tujuan dari misi IV adalah mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi. Untuk menyelaraskan dengan visi misi dan tujuan RPJMD Kota Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan tujuan dan sasaran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan: Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	95,31%	95,53%	95,76%	95,98%	96,21%	96,42%
		Sasaran: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	99,90%
			Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,88%	99,89%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
			Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,58%	96,60%	96,65%	96,70%	96,75%	96,80%
		Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai standar nasional dan kebutuhan daerah	90 %					
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga		29%	35%	41%	47%	52%

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Tabel 2.14
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (%)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,40	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90
		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	86	87	88	89	90	90

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Periode 2025-2030

Keterangan:

1. Pada awal perencanaan tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadikan acuan dokumen renstra 2021 – 2026, namun di tribulan 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan dokumen Renstra 2025-2030 sebagai dasar dokumen perencanaan karena terpilihnya Walikota Pasuruan yang baru dan dokumen RPJMD 2025-2030.
2. Karena bergantinya RPJMD dari periode 2021-2026 ke RPJMD periode 2025-2030 maka tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berubah seperti yang tertuang pada tabel periode 2025-2030.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja perangkat daerah yaitu :

1. *Spesifik* : indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable* : indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable* : indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant* : indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines* : indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Indikator kinerja juga dapat fleksibel, sehingga apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
Sebelum Perubahan					
1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang mempunyai KTP elektronik dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP elektronik	Jumlah penduduk ber-KTP elektronik x 100% Jumlah penduduk wajib KTP elektronik	Dispenduk Capil
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dibandingkan dengan penduduk usia 0 s.d 18 tahun	Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran x 100% Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun	Dispenduk Capil
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	jumlah penduduk status kawin yang mempunyai akta perkawinan dibandingkan dengan jumlah penduduk berstatus kawin	Jumlah penduduk ber-akta perkawinan x 100% Jumlah penduduk Status kawin	Dispenduk Capil
2.	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	OPD / Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dibandingkan dengan jumlah OPD / lembaga	Jumlah OPD / lembaga yang memanfaatkan data kependudukan x 100% Jumlah OPD / Lembaga	Dispenduk Capil
Setelah Perubahan					
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan	Indeks kualitas layanan kependudukan dan	Nilai Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai capaian kinerja layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Dispenduk Capil

	pencatatan sipil	pencatatan sipil		(penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA,NIK,KTP Elektronik dan data kependudukan kepada lembaga pengguna, penerapan buku pokok pemakaman, penerapan identitas kependudukan)	

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja perangkat daerah yaitu :

1. *Spesifik* : indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable* : indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable* : indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant* : indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines* : indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Indikator kinerja juga dapat fleksibel, sehingga apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

6. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
7. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
8. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
9. Kebutuhan statistik pemerintah.
10. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Sebelum Perubahan						
1	**Terwujudnya Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib**			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	persen	98,27
		1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	persen	98,90
				Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	persen	99,90
				Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	persen	96,75
		2	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	persen	47
Setelah Perubahan						
1.	**Terwujudnya Pelayanan administrasi kependudukan yang prima**			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40
		1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	86

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	98,90%

	yang sesuai standart		
2.	Meningkatnya pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai standart	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	99,90%
3.	Meningkatnya pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai standart	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%
	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	47%

No.	Program	Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.917.816.295
2.	Program Pendaftaran Penduduk	352.503.100
3.	Program Pencatatan Sipil	198.082.200
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Pependudukan	36.157.700
	Jumlah	**5.504.559.295**

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**90%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**90%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**90%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 laporan

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**90%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**90%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**90%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**90%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**90%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase penduduk ber-KTP Elektronik** **Persentase penduduk usia 0 s.d 17tahun ber-KIA**	**98,90%** **96%**
	Pelayanan Pendaftaran	**Jumlah Pendaftaran Penduduk yang terlayani**	**4 jenis**

	Penduduk		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1500 dokumen
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4 laporan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penatan pendaftaran penduduk yang tersedia**	**3 jenis**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 dokumen
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan**	**3 jenis**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500 dokumen
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran** **Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan**	**99,90%** **96,75%**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Akta Kelahiran danKematian yang diterbitkan**	**4.000 akta**
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil**	**25 orang**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 laporan

	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	4 laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga**	**47%**
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola**	**1 aplikasi**
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	20 dokumen
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 35.000.000**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.000.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 3.905.936.320**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.905.936.320
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 29.782.700
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Rp 33.105.700
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 33.105.700
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 132.376.100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.000.900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 9.022.200
	Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 110.353.000
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 110.353.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 110.353.000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 596.668.378**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 62.988.528
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 533.679.850
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 201.540.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 43.570.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 111.050.000

	Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 46.920.000
8	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 220.032.700**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 24.276.100
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 195.756.600
9	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 94.089.100**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 18.394.900
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Rp 75.694.200
10	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 38.381.300**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 38.381.300
11	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rp 143.965.700**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp 9.358.200
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 64.617.100
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Rp 69.990.400
12	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rp 54.116.500**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Rp 13.163.100
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Rp 40.953.400
13	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Rp 36.157.700**
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 11.471.800
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 24.685.900

Sumber : DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Pada tanggal 18 September 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 -2029 dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86

3.

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.091.497.860
2.	Program Pendaftaran Penduduk	234.221.400
3.	Program Pencatatan Sipil	121.348.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Pependudukan	25.266.900
	Jumlah	**5.472.334.160**

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ada perubahan sasaran Strategis Karna Menyesusuaikan Indikator Kinerja Dari Pusat.

Tabel 2.7
Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**90%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**90%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase temuan yang ditindaklanjuti**	**90%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**90%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase kebutuhan penunjang**	**90%**

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**pemerintahan yang terfasilitasi**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**90%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**90%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase penduduk ber-KTP Elektronik** **Persentase penduduk usia 0 s.d 17tahun ber-KIA**	**98,90%** **96%**
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Pelayanan Penduduk yang terlayani**	**4 jenis**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1500 dokumen
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4 laporan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penatan pendaftaran penduduk yang tersedia**	**3 jenis**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran Penduduk yang disusun	15000 dokumen
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen

	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan**	**3 jenis**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500 dokumen
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran** **Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan**	**99,90%** **96,70%**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan**	**4.000 akta**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4000 Dokumen
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil**	**25 orang**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 laporan
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	4 laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga**	**47%**
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola**	**1 aplikasi**
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 dokumen
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 4.105.058. 100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.075.275.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 29.782.700
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp 33.105.700**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 33.105.700
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 68.694.900**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.088.700
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 5.490.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 55.116.000
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 157.630.226**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 157.630.226
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 594.830.934**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 124.487.584
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 470.343.350
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 132.178.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 32.088.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 74.340.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.750.000
7	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 148.351.400**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 13.388.100
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 134.963.300
8	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 65.048.700**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 16.085.300
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Rp 48.963.400
9	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 20.821.300**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 20.821.300
10	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rp 96.840.800**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp 7.855.800
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 53.344.300
11	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rp 24.507.200**

	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Rp 3.314.100
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Rp 21.193.100
12	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Rp 25.266.900**
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 6.845.500
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 18.421.400

Sumber : DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2025

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- ✓ Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dan persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan. Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan sebesar 99,90% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian 100,10%. Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya roadshow gerakan tuntas administrasi kependudukan yang diselenggarakan di Kelurahan se-Kota Pasuruan serta kerjasama dengan 26 titik layanan persalinan di Kota Pasuruan melalui Layanan BANGKIT (Bayi Lahir Langsung Akta Terbit) sehingga pengurusan akta kelahiran semakin mudah, cepat dan gratis. Pada indikator persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan sebesar 96,75% dengan capaian realisasi sebesar 98,53% atau capaian 101,84%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya warga yang melaporkan data perkawinannya. Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

- ✓ Program pendaftaran penduduk memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk ber-KTP elektronik dan persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA. Pada indikator persentase penduduk ber-KTP elektronik ditargetkan sebesar 98,50% dengan realisasi kinerja sebesar 99,20% atau capaian 99,70%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi GETUK (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan) Inovasi penerbitan Dokumen Adminduk yang dilakukan secara jemput bola. Pemohon dapat memanggil dukcapil melakukan pelayanan di wilayahnya dengan mendaftarkan secara kolektif minimal 10 pemohon.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dalam mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar” dan “Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar” dibutuhkan penetapan strategi serta arah kebijakan. Strategi adalah pendekatan

secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).* Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah:

- Meningkatkan kualitas aparatur, prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Membangun layanan terintegrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/ Lembaga.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah:

- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dalam pemanfaatan data kependudukan.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sebelum Perubahan							
1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,50%	99,20%	99,20%	Memuaskan	Dispenduk Capil
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90%	100,00%	100,10%	Memuaskan	Dispenduk Capil
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%	98,53%	101,84%	Memuaskan	Dispenduk Capil
3	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	47%	47%	100 %	Memuaskan	Dispenduk Capil
Setelah Perubahan							
1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indek Kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	90,00%	90,00%	100 %	Memuaskan	Dispenduk Capil

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program pendaftaran penduduk memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk ber-KTP elektronik dan persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA. Pada indikator persentase penduduk ber-KTP elektronik ditargetkan sebesar 99,50% dengan realisasi kinerja sebesar 99,20% atau capaian 99,70%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi

JALAN BERDUA (Kerja Sama Pelayanan Penerbitan KTP-El dengan KUA), dan layanan penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan berbagai inovasi layanan pendaftaran penduduk yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan kepada warga disabilitas (sakit, orangtua, ODGJ). Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA ditargetkan sebesar 96% dengan realisasi kinerja sebesar 99,78% atau capaian 103,94%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah layanan penjangkauan di sekolah dalam penuntasan kepemilikan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Program pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu, pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dan persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan. Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan sebesar 99,90% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian 100,10%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi PETERPAN (Pelayanan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak), dan layanan penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan berbagai inovasi layanan pencatatan sipil yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan ke rumah warga. Pada indikator persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan sebesar 96,75% dengan capaian realisasi sebesar 98,53% atau capaian 101,84%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya warga yang melaporkan data perkawinannya. Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga, ditargetkan 47% dengan realisasi kinerja sebesar 47% atau capaian 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah karena data kependudukan yang valid sehingga terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan

dengan perangkat daerah / lembaga lain. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sebelum Perubahan							
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,69%	99,68%	99,50%	99,20%	99,70%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,97%	100,00%	99,90%	100,00%	100,10%
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	98,33%	98,47%	96,75%	98,53%	101,84%
2.	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	35,29%	41%	47%	47%	100 %
Setelah Perubahan							
1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indek Kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil			90,00%	90,00%	100 %

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi persentase penduduk ber-KTP Elektronik sebesar 98,18%, dimana jumlah penduduk ber-KTP elektronik 154.987 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP elektronik 157.844 jiwa. Data penduduk ber-KTP Elektronik ini terdapat di masing-masing kecamatan sebagai berikut :
   - Kecamatan Gadingrejo, jumlah penduduk ber-KTP elektronik 36.938 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik 37.594 jiwa.
   - Kecamatan Purworejo, jumlah penduduk ber-KTP elektronik 45.664 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik 46.462 jiwa.
   - Kecamatan Bugulkidul, jumlah penduduk ber-KTP elektronik 23.729 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik 24.176 jiwa.
   - Kecamatan Panggungrejo, jumlah penduduk ber-KTP elektronik 48.656 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik 49.612 jiwa.
2. Realisasi persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran sebesar 99,99%, dimana jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran 60.979 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun 60.986 jiwa. Data penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ini terdapat di masing-masing kecamatan sebagai berikut :
   - Kecamatan Gadingrejo, jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran 15.220 jiwa dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun 15.222 jiwa.
   - Kecamatan Purworejo, jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran 17.850 jiwa dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun 17.852 jiwa.
   - Kecamatan Bugulkidul, jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran 8.969 jiwa dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun 8.971 jiwa.
   - Kecamatan Panggungrejo, jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran 18.940 jiwa dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun 18.941 jiwa.
3. Realisasi persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan sebesar 98,52%, dimana jumlah penduduk ber-akta perkawinan 95.693 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk

status kawin 97.132 jiwa. Data penduduk status kawin ber-akta perkawinan ini terdapat di masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Gadingrejo, jumlah penduduk ber-akta perkawinan 23.526 jiwa dari jumlah penduduk status kawin 23.904 jiwa.
- Kecamatan Purworejo, jumlah penduduk ber-akta perkawinan 28.571 jiwa dari jumlah penduduk status kawin 28.857 jiwa.
- Kecamatan Bugulkidul, jumlah penduduk ber-akta perkawinan 14.921 jiwa dari jumlah penduduk status kawin 15.127 jiwa.
- Kecamatan Panggungrejo, jumlah penduduk ber-akta perkawinan 28.675 jiwa dari jumlah penduduk status kawin 29.244 jiwa.

4. Realisasi persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga sebesar 47%, dimana jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan 12 OPD dibandingkan dengan jumlah OPD/Lembaga 34 OPD. OPD yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebagai berikut :
   - Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   - Dinas Kesehatan
   - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
   - Dinas Sosial
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   - Badan Pendapatan Daerah
   - Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika
   - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedarsono
   - Dinas perpustakaan dan kearsipan

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap target tahun 2025, Renstra 2021-2026, dan target nasional sudah menunjukkan pencapaian yang baik dengan realisasi capaian sebesar 99,70% dari target tahun 2025 sebesar 99,50% dan target nasional sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penjangkauan kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP dengan layanan jemput bola ke rumah warga dan sekolah bagi anak yang memasuki usia 17 tahun berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dengan adanya inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terus dikembangkan dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dan layanan jemput bola kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta adanya laporan dari aparat setempat (RT/RW) dalam menginformasikan peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayahnya, sehingga target yang ditetapkan pada dokumen perangkat daerah dan target nasional dapat tercapai dengan maksimal.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target, realisasi, dan pencapaian masing- masing indikator. Pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,50%	99,20%	99,70%
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90%	100,00%	100,10%
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%	98,53%	101,84%

4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	47%	47%	100 %
	Rata- rata			100.41%

Dari tabel diatas dapat menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,41% (dalam katagori **sangat memuaskan**). Pencapaian kinerja sasaran ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat disepanjang tahun 2025, melakukan berbagai Inovasi untuk membangun pelayanan publik yang cepat, mudah, gratis dan membahagiakan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan yang terkait dengan pelayanan publik yaitu Digitalisasi dan Pendekatan Layanan Publik.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melaksanakan 1 (satu) program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan 3 (tiga) program utama yang terdiri dari program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program pendaftaran penduduk memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk ber-KTP elektronik dan persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA. Pada indikator persentase penduduk ber-KTP elektronik ditargetkan sebesar 99,50% dengan realisasi kinerja sebesar 99,20% atau capaian 99,70%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi JALAN BERDUA (Kerja Sama Pelayanan Penerbitan KTP-El dengan KUA), dan layanan penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan berbagai inovasi layanan pendaftaran penduduk

yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan kepada warga disabilitas (sakit, orangtua, ODGJ). Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA ditargetkan sebesar 96%
dengan realisasi kinerja sebesar 99,78% atau capaian 103,94%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah layanan penjangkauan di sekolah dalam penuntasan kepemilikan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Program pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu, pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dan persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan. Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan sebesar 99,90% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian 100,10%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi PETERPAN (Pelayanan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak), dan layanan penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan berbagai inovasi layanan pencatatan sipil yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan ke rumah warga. Pada indikator persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan sebesar 96,75% dengan capaian realisasi sebesar 98,53% atau capaian 101,83%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya warga yang melaporkan data perkawinannya. Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga, ditargetkan 47% dengan realisasi kinerja sebesar 47% atau capaian 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah karena data kependudukan yang valid sehingga terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah / lembaga lain. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

Selain capaian indikator kinerja yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan juga mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2025, sebagai berikut :

1. Penghargaan “DUKCAPIL BISA” yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi yang luar biasa, komitmen yang kuat dan konsisten dalam menjalankan tugas sehingga terwujud pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.
2. Juara 1 Lomba Arsip yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Inovasi Pelayanan Publik “Peti Kemas” (Pelayanan Terintegrasi Akta Kematian dengan RSUD) dan PDKT (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi) Peringkat 10 Besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Inovasi Pelayanan Publik “Titik Nol” (Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Pengadilan Agama Secara Online) Peringkat 3 Besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Dalam evaluasi capaian program kegiatan, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perwujudan Kota Pasuruan sebagai layanan satu pintu sehari pasti jadi.
2. Penerapan konsep smart city yang terpadu sebagai implementasi satu data Kota Pasuruan
3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan upaya dalam aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari langsung jadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan.
2. Telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah/lembaga lain dalam mendukung Smart City.
3. Telah dilakukan aksi jemput bola layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga

dan tempat strategis lainnya dalam memudahkan layanan yang membahagiakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu kurangnya pemahaman sebagian kecil warga tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi di kelurahan dan penjangkauan layanan kepada warga melalui layanan jemput bola di kelurahan, sekolah, dan tempat umum.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Masih sedikitnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Masih sedikitnya perangkat daerah/lembaga lain yang memanfaatkan data kependudukan.
3. Masih adanya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih dari satu hari.

Untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya perlu diupayakan pengembangan inovasi pelayanan yang berkelanjutan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, inovatif dan memuaskan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik.

Selain inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, peluang yang harus dilakukan dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan di tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan komunikasi dan kerjasama layanan perangkat daerah/ lembaga lain dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama pemaanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/ lembaga lain.
3. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari jadi.
4. Pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan ojek online / kantor pos

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tahun 2025 telah menindaklanjuti penyelesaian isu strategis yang ada di Kota Pasuruan dengan adanya layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Mal Pelayanan Publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 97,14 (Sangat Baik).

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,20%	99,50%	99,69%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	100,00%	99,90%	100,10%
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	98,53%	96,75%	101,83%
2.	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	47%	47%	100,00 %

Tingkat Kemajuan capaian kinerja layanan kependudukan dan pencatatan sipil Cukup Dekat, masing-masing indikator kinerja menunjukkan tingkat Kemajuan kinerja yang Bagus. Indikator kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan Realisasi yang Hampir Menyamai target jangka menengah.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,20%	100 % (Standar Nasional)	99,20%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	100%	100% (Standar Nasional)	100%
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	98,53%	100% (Standar Nasional)	98,47%
	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	47%	54% (Standar Nasional)	87,03%

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98,50%	99,20%	99,70%	Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi GETUK (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan) Inovasi penerbitan Dokumen Adminduk yang dilakukan secara jemput bola. Pemohon dapat memanggil dukcapil melakukan	

	sesuai standar					pelayanan di wilayahnya dengan mendaftarkan secara kolektif minimal 10 pemohon.	
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90%	100,00%	100,10%	Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya roadshow gerakan tuntas administrasi kependudukan yang diselenggarakan di Kelurahan se-Kota Pasuruan serta kerjasama dengan 26 titik layanan persalinan di Kota Pasuruan melalui Layanan BANGKIT (Bayi Lahir Langsung Akta Terbit) sehingga pengurusan akta kelahiran semakin mudah, cepat dan gratis	
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%	98, 53%	101,84%	Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya roadshow gerakan tuntas administrasi kependudukan yang diselenggarakan di Kelurahan se-Kota Pasuruan serta dilaunchingnya inovasi DOA LANGIT (Dokumen Kependudukan Langsung Terbit Setelah Pemberkatan Perkawinan) membuat proses penerbitan akta perkawinan semakin mudah dan cepat	
2	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	47%	47%	100 %	Ketercapaian target indikator didukung dengan adanya Inovasi PDKT (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi) dan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil capaian kinerja dan serapan anggaran, maka dapat dihitung tingkat efisiensi tiap indikator sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,70%	97,50%	2,20%	Efisien
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun	100,10%	95,54%	5,43%	Efisien

		ber-akta kelahiran				
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	101,84%			
3.	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	100 %	95,88%	4,12%	Efisien

4.

Tingkat efisiensi capaian kinerja layanan kependudukan dan pencatatan sipil dan capaian anggaran cukup bagus, masing-masing indikator kinerja menunjukkan tingkat efisiensi kinerja terhadap anggaran. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dari jumlah pagu yang direncanakan

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil capaian kinerja dan serapan anggaran, maka dapat dihitung tingkat efisiensi tiap indikator sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
1.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	99,70%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik, Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	97,50%	2,20%	Efisien
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang terlayani	97,48%		
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penatan pendaftaran penduduk yang tersedia	97,51%		
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	97,62%		

		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran, Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	100,10% 101,84%	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d18 tahun ber-akta kelahiran, Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	95,54%	4,63%	Efisien
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	94,72%		
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	98,76%		
2.	Terkelolanya informasi administrasi Kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	100 %	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	95,88%	4,12%	Efisien
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	95,88%		
3.	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	91,04%	10,28%	Efisien
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	92,08%		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	74,95%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	99,60%		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	93,99%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya jasa	82,25%		

				Pemerintahan Daerah	penunjang layanan perkantoran			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	94,11%		

Tingkat efisiensi capaian kinerja layanan kependudukan dan pencatatan sipil dan capaian anggaran cukup bagus, masing-masing indikator kinerja menunjukkan tingkat efisiensi kinerja terhadap anggaran. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dari jumlah pagu yang direncanakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas sering diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar pengertian akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pengelola keuangan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBN/APBD".

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.091.497.860**	**4.635.054.171**	**91,04%**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.105.058.100	3.779.997.272	92,08%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.105.700	24.812.486	74,95%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.694.900	68.420.794	99,60%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.630.226	148.156.050	93,99%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.830.934	489.270.213	82,25%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.178.000	124.397.356	94,11%
B	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**234.221.400**	**228.370.583**	**97,50%**
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	148.351.400	144.616.084	97,48%
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	65.048.700	63.428.411	97,51%
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20.821.300	20.326.088	97,62%
C	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**121.348.000**	**115.934.398**	**95,54%**
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	96.840.800	91.731.137	94,72%
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	24.507.200	24.203.261	98,76%
D	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**25.266.900**	**24.225.008**	**95,88%**
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	25.266.900	24.225.008	95,88%
	JUMLAH	**5.472.334.160**	**5.003.584.160**	**91,43%**

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.003.584.160 atau 91,43**%** dari pagu anggaran Rp 5.472.334.160. Terdapat SILPA sebesar Rp 468.750.000. Realisasi anggaran program kegiatan sebagian besar sudah baik diatas 80%, program kegiatan tersebut dilakukan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil, Mal Pelayanan Publik, kelurahan, tempat umum, sekolah, dan penjangkauan ke rumah warga.

3.3. Inovasi

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

- **PETERPAN (Pelayanan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak)**

  Inovasi penerbitan **Akta Kelahiran** yang berkolaborasi dengan Kelurahan, Sekolah, PKK, RS bersalin, Bidan praktek mandiri, Klinik bersalin, Rumah bersalin dan SLB Lawang. Meningkatkan cakupan dari **44,34% tahun 2013** menjadi **100% tahun 2023.**

- **PASTI DAKU KAWIN (Pemenuhan Status Hayati Dokumen Kependudukan dan Perkawinan)**

  Inovasi penerbitan **Akta Perkawinan** yang berkolaborasi dengan Kelurahan, Kemenag/KUA, SLB Lawang dan POS/Ojek Online. Meningkatkan cakupan dari **66.73% tahun 2014** menjadi **98.39% tahun 2023.**

- **PESTA TERAHIR (Pemenuhan Status Hayati Cerai Hidup Terintegrasi)**

  Inovasi penerbitan **Akta Perceraian** yang berkolaborasi dengan Kelurahan dan Pengadilan Agama.Meningkatkan cakupan dari **49.74% tahun 2014** menjadi **90.61% tahun 2023.**

- **LENTERA BUMI (Layanan Terintegrasi Akta Kematian dan Buku Pokok Kematian)**

  Inovasi Layanan Terintegrasi Akta Kematian dan Buku Pokok Kematian baru saja dilaunching pada 10 Juni 2024, inovasi ini untuk mewujudkan percepatan kepemilikan Akta Kematian dan ketersediaan data kematian riiltime pada buku pokok kematian. Inovasi ini bekerja sama dengan RSUD dr. Soedarsono dan RS Graha Sehat Medika Kota Pasuruan.

- **GETUK (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan)**

  Inovasi penerbitan **Dokumen Adminduk** yang dilakukan secara jemput bola.

Pemohon dapat memanggil dukcapil melakukan pelayanan di wilayahnya dengan mendaftarkan secara kolektif minimal 10 pemohon.

- **GERILYAWAN (Gerakan Perekaman Biometrik Langsung Kepada Warga Kota Pasuruan)**

Inovasi penerbitan **Dokumen Adminduk** yang dilakukan secara jemput bola. Gerilyawan dilakukan kepada penduduk yang membutuhkan perlakuan khusus seperti; **sakit**, **disabilitas**, **rentan** dan **ODGJ.**

- **PADUKA (Pelayanan Dukcapil di Kelurahan)**

Inovasi penerbitan **Dokumen Adminduk** yang berkolaborasi dengan Kelurahan se-Kota Pasuruan. Kelurahan (petugas register) sebagai perpanjangan tangan Dispendukcapil agar masyarakat lebih dekat dan mudah dalam menegurus dokumen adminduk. Dokumen yang terselesaikan akan dikirim by WhatsApp (WA) kepada warga.

- **KADO (KTP KIA Delivery Order)**

Inovasi penerbitan **KTP dan KIA** yang dikirim secara *delivery order* ke rumah penduduk. KTP bagi penduduk yang berusia 17 tahun sebagai kado ulang tahun dan KIA bagi bayi baru lahir sebagai kado kelahiran**.** Inovasi ini berkolaborasi dengan PT POS Indonesia untuk pengiriman dokumen.

- **OKE (Online Administrasi Kependudukan)**

Inovasi **berbasis gawai Android** yang digunakan untuk melakukan **pengajuan dokumen adminduk secara online**. Dan juga digunakan oleh beberapa instansi yang telah bekerja sama dalam layanan terintegrasi, antara lain:

- 34 petugas register kelurahan
- 28 petugas praktek bidan mandiri (untuk kelahiran)
- 8 petugas juru makam (untuk kematian)
- 4 Petugas Kantor Urusan Agama (untuk pernikahan)

- **PENDEKAR (Penerbitan Dokumen Kependudukan Braile)**

  Inovasi penerbitan **Dokumen Adminduk** yang dicetak di **kertas braile** yang diberikan kepada pemohon disabilitas (tunanetra).

  Inovasi ini berkolaborasi dengan SLB Pembina Malang untuk pencetakan dokumennya dan telah menerbitkan 34 dokumen kependudukan.

  Inovasi ini masuk TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se Kota Pasuruan

- **JALAN BERDUA (Kerja Sama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-El dengan KUA)**

  Inovasi penerbitan **Kartu Keluarga karena perubahan status kawin (Perkawinan)** yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama / Kantor Urusan Agama. Dokumen yang sudah jadi akan **diantar oleh ojek online** (grab, nujek, copas) secara **gratis**. **Inovasi ini masuk TOP 3 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se Kota Pasuruan**

- **TITIK NOL (Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Pengadilan Agama Secara Online)**

  Inovasi penerbitan **Kartu Keluarga karena perubahan status kawin (Perceraian)** atas kepemilikan Akta Perceraian penduduk.Dokumen yang sudah jadi akan **diantar oleh ojek online** (grab, nujek, copas) secara **gratis**.

  Inovasi ini masuk TOP 3 Kompetisi Inovasi Reka Karsa Cipta se Kota Pasuruan

- **SIP (Sistem Informasi Penduduk)**

  Inovasi **berbasis web** yang memuat data agregat dan informasi kependudukan, mulai dari persyaratan dan alur pengajuan dokumen adminduk, data kependudukan, dan survei kepuasan masyarakat.

- **DOA LANGIT (Dokumen Kependudukan Langsung Terbit Setelah Pemberkatan)**

  Inovasi Doa Langit adalah inovasi yang bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam mengurus perubahan status kawin pada dokumen adminduk dan bekerja sama dengan **Klenteng Tjoe Tik Kiong**. Produk yang dihasilkan dari inovasi ini yaitu; KTP El 2 dokumen, KK 3 dokumen, Kutipan Akta Perkawinan.

3.4. Penghargaan

- **Piagam - Piagam**





BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pelaksanaan sasaran dan tujuan serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai inovasi pelayanan publik. Inovasi yang berkelanjutan merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membangun pelayanan publik yang cepat, mudah, gratis dan akurat serta membahagiakan masyarakat. Dengan semangat Gerakan Kota Pasuruan Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan berbagai inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan publik serta menyelenggarakan data penduduk yang akurat, sehingga data kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Pasuruan. Data pencapaian target kinerja sasaran tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian													
				Sangat Memuaskan		Memuaskan		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang		Sangat Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Misi IV : Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif																	
1	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	4	100,41%	4	100,78% 100,96% 101,84% 100 %												

Dari tabel pencapaian target kinerja sasaran tahun 2025 tersebut bisa dilihat bahwa 4 (Empat) indikator sasaran masuk kategori “Sangat Memuaskan”, Rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan nilai yang sangat memuaskan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ADI WIBOWO	SITI MARIYAM, S.Sos, MM NIP. 196703161989032012

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II

NAMA	:	SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP	:	196703161989032012
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	98,90%
2	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	99,90%
3	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%
6	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	47%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.917.816.295,00	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	352.503.100,00	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	198.082.200,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	36.157.700,00	
JUMLAH		**Rp**	**5.504.559.295,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP. 196703161989032012

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II

NAMA	:	SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP	:	196703161989032012
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																										%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	%	96,00		96,20		96,50		96,70		96,90		97,20		97,40		97,70		98,00		98,30		98,60		98,90		98,90		
2	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	%	99,89		99,89		99,89		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90		
3	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	96,74		96,74		96,74		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75		
6	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	41		44		44		44		44		44		44		47		47		47		47		47		47		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN SEBELUM		ANGGARAN SESUDAH		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.917.816.295	Rp	5.091.497.860	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	352.503.100	Rp	234.221.400	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	198.082.200	Rp	121.348.000	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	36.157.700	Rp	25.266.900	
JUMLAH		**Rp**	**5.504.559.295**	**Rp**	**5.472.334.160**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP. 196703161989032012

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ADI WIBOWO	SITI MARIYAM, S.Sos, MM NIP. 196703161989032012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP : 196703161989032012
PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / 14
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	98,90%	-
2	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	99,90%	-
3	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,75%	-
4	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	47%	-
5	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	95,05%	-
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	-	86

NO	PROGAM	ANGGARAN SEBELUM		ANGGARAN SESUDAH		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.917.816.295	Rp	5.091.497.860	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	352.503.100	Rp	234.221.400	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	198.082.200	Rp	121.348.000	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	36.157.700	Rp	25.266.900	
JUMLAH		**Rp**	**5.504.559.295**	**Rp**	**5.472.334.160**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP. 196703161989032012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA	:	SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP	:	196703161989032012
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	%	96,00		96,25		96,50		96,75		97,00		97,25		97,50		97,75												
2	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang ber-akta kelahiran	%	99,89		99,89		99,89		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90												
3	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	96,74		96,74		96,74		96,75		96,75		96,75		96,75		96,75												
4	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	41		41		41		44		44		44		44		47												
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	-		-		-		-		-		-		-		-		86		86		86		86		86		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN SEBELUM		ANGGARAN SESUDAH		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.917.816.295	Rp	5.091.497.860	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	352.503.100	Rp	234.221.400	
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	198.082.200	Rp	121.348.000	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	36.157.700	Rp	25.266.900	
JUMLAH		**Rp**	**5.504.559.295**	**Rp**	**5.472.334.160**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP. 196703161989032012

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	NDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.346.609.948		5.637.960.396		6.015.820.358		5.938.529.227		5.876.278.598		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.759.866.948		4.692.463.549		5.020.084.868		4.939.822.438		4.861.928.972		
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	0	3	4.759.866.948	3	4.692.463.549	3	5.020.084.868	3	4.939.822.438	3	4.861.928.972	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,46	82,1		82,7		83,3		83,9		84,5			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.625.000		59.900.400		60.632.900		61.914.400		63.260.300		
Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	5	11.625.000	5	59.900.400	5	60.632.900	5	61.914.400	5	63.260.300		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	NDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.976.500		14.650.500		15.383.000		16.152.000		16.959.800		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	6	6.976.500	6	14.650.500	6	15.383.000	6	16.152.000	6	16.959.800		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa Realisasi Kinerja SKPD				4.648.500		10.249.900		10.249.900		10.762.400		11.300.500		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	5	4.648.500	5	10.249.900	5	10.249.900	5	10.762.400	5	11.300.500		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.905.936.320		3.543.876.849		3.803.349.868		3.644.083.338		3.525.956.722		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	28	3.905.936.320	28	3.543.876.849	28	3.803.349.868	28	3.644.083.338	28	3.525.956.722		

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	17		17		17		17		17			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.876.153.620		3.514.094.149		3.770.514.468		3.609.606.238		3.489.755.722		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	28	3.876.153.620	28	3.514.094.149	28	3.770.514.468	28	3.609.606.238	28	3.489.755.722		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				29.782.700		29.782.700		32.835.400		34.477.100		36.201.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	17	29.782.700	17	29.782.700	17	32.835.400	17	34.477.100	17	36.201.000		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				33.105.700		40.074.000		42.077.700		44.181.500		46.390.600		
Tersusunya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	33.105.700	4	40.074.000	4	42.077.700	4	44.181.500	4	46.390.600		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.313.100		5.578.700		5.857.600		6.150.500		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0	2	5.313.100	2	5.578.700	2	5.857.600	2	6.150.500		

2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				**33.105.700**		**34.760.900**		**36.499.000**		**38.323.900**		**40.240.100**		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)**	**4**	**4**	**33.105.700**	**4**	**34.760.900**	**4**	**36.499.000**	**4**	**38.323.900**	**4**	**40.240.100**		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**0**		**38.981.200**		**40.930.300**		**42.976.900**		**45.125.700**		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)**			**0**	**4**	**38.981.200**	**4**	**40.930.300**	**4**	**42.976.900**	**4**	**45.125.700**		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				**54**		**54**		**54**		**54**			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				**0**		**32.263.800**		**33.877.000**		**35.570.900**		**37.349.400**		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)**			**0**	**54**	**32.263.800**	**54**	**33.877.000**	**54**	**35.570.900**	**54**	**37.349.400**		
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				**0**		**6.717.400**		**7.053.300**		**7.406.000**		**7.776.300**		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)**			**0**	**4**	**6.717.400**	**4**	**7.053.300**	**4**	**7.406.000**	**4**	**7.776.300**		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**91.991.100**		**146.106.400**		**158.280.100**		**165.269.200**		**172.607.700**		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**3**	**4**	**91.991.100**	**4**	**146.106.400**	**4**	**158.280.100**	**4**	**165.269.200**	**4**	**172.607.700**		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**1**			**1**		**1**		**1**		**1**			

	yang Disediakan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.900		3.150.900		3.308.400		3.473.900		3.647.600		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.900	1	3.150.900	1	3.308.400	1	3.473.900	1	3.647.600		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.490.200		9.473.300		9.946.900		10.444.300		10.966.500		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa yang Disediakan (Paket)	3	4	5.490.200	4	9.473.300	4	9.946.900	4	10.444.300	4	10.966.500		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		4.629.200		4.860.700		5.103.700		5.358.900		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0	1	4.629.200	1	4.860.700	1	5.103.700	1	5.358.900		
2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		110.353.000		121.664.100		127.747.300		134.134.700		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	70.000.000	12	110.353.000	12	121.664.100	12	127.747.300	12	134.134.700		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		47.442.100		49.814.200		52.304.900		54.920.200		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0	10	47.442.100	10	49.814.200	10	52.304.900	10	54.920.200		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		47.442.100		49.814.200		52.304.900		54.920.200		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17		0	10	47.442.100	10	49.814.200	10	52.304.900	10	54.920.200		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				515.668.828		566.920.900		595.267.000		645.867.600		656.281.900		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		515.668.828	1	566.920.900	1	595.267.000	1	645.867.600	1	656.281.900		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		2.100.000		2.205.000		23.152.500		2.431.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0	1	2.100.000	1	2.205.000	1	23.152.500	1	2.431.000		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.014.928		50.415.600		52.936.400		55.583.200		58.362.400		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	48.014.928	12	50.415.600	12	52.936.400	12	55.583.200	12	58.362.400		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				467.653.900		514.405.300		540.125.600		567.131.900		595.488.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	467.653.900	12	514.405.300	12	540.125.600	12	567.131.900	12	595.488.500		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.540.000		249.161.700		269.732.800		283.224.600		297.385.850		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	35	201.540.000	35	249.161.700	35	269.732.800	35	283.224.600	35	297.385.850		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)				1		1		1		1			

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15		15		15		15		15			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.570.000		43.570.000		48.035.900		50.437.700		52.959.600		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	43.570.000	1	43.570.000	1	48.035.900	1	50.437.700	1	52.959.600		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.050.000		111.050.000		122.432.600		128.554.200		134.981.900		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	111.050.000	15	111.050.000	15	122.432.600	15	128.554.200	15	134.981.900		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.920.000		49.266.000		51.729.300		54.315.700		57.031.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	35	46.920.000	35	49.266.000	35	51.729.300	35	54.315.700	35	57.031.500		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		45.275.700		47.535.000		49.917.000		52.412.850		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0	1	45.275.700	1	47.535.000	1	49.917.000	1	52.412.850		
Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP (%)	99,68	98	352.503.100	98,1	524.157.281	98,2	556.110.148	98,3	564.327.063	98,4	578.438.803	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS	

	Persentase kepemilikan KIA (%)	99,44	97		97,5		98		98,5		99		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase kepemilikan IKD (%)	0	14		15		16		17		18			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				220.032.700		312.565.700		328.193.900		344.603.600		361.833.800		
Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	18.776	1.000	220.032.700	1.000	312.565.700	1.000	328.193.900	1.000	344.603.600	1.000	361.833.800		
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				24.276.100		24.276.100		25.489.900		26.764.400		28.102.600		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	18.776	1.000	24.276.100	1.000	24.276.100	1.000	25.489.900	1.000	26.764.400	1.000	28.102.600		
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				195.756.600		288.289.600		302.704.000		317.839.200		333.731.200		
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	4	12	195.756.600	12	288.289.600	12	302.704.000	12	317.839.200	12	333.731.200		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				94.089.100		95.008.800		95.008.800		95.008.800		95.008.800		

Terlaksananya pencatatan dokumen pendukung pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	18.776	15.000	94.089.100	15.000	95.008.800	15.000	95.008.800	15.000	95.008.800	15.000	95.008.800		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				18.394.900		19.314.600		19.314.600		19.314.600		19.314.600		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	18.776	15.000	18.394.900	15.000	19.314.600	15.000	19.314.600	15.000	19.314.600	15.000	19.314.600		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				75.694.200		75.694.200		75.694.200		75.694.200		75.694.200		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2	2	75.694.200	2	75.694.200	2	75.694.200	2	75.694.200	2	75.694.200		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan				38.381.300		116.582.781		132.907.448		124.714.663		121.596.203		

Pendaftaran Penduduk														
Tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir	**Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)**	**600**	**600**	**38.381.300**	**600**	**116.582.781**	**600**	**132.907.448**	**600**	**124.714.663**	**600**	**121.596.203**		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)				**4**		**4**		**4**		**4**			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembag Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)				**4**		**4**		**4**		**4**			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				**0**		**46.381.300**		**46.381.300**		**46.381.300**		**46.381.300**		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembag Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)**			**0**	**4**	**46.381.300**	**4**	**46.381.300**	**4**	**46.381.300**	**4**	**46.381.300**		
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				**38.381.300**		**40.300.300**		**42.315.500**		**44.431.300**		**46.652.865**		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)**	**600**	**600**	**38.381.300**	**600**	**40.300.300**	**600**	**42.315.500**	**600**	**44.431.300**	**600**	**46.652.865**		

2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				0		29.901.181		44.210.648		33.902.063		28.562.038		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)			0	4	29.901.181	4	44.210.648	4	33.902.063	4	28.562.038		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				198.082.200		230.249.492		243.181.867		244.369.615		249.418.973		
Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	100	99,94	198.082.200	99,95	230.249.492	99,96	243.181.867	99,97	244.369.615	99,98	249.418.973	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase kepemilikan akta perkawinan (%)	98,47	97		98		98,2		98,4		98,6			
	Persentase kepemilikan akta perceraian (%)	0	85		86		87		88		89			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				143.965.700		144.433.600		144.924.900		145.440.700		145.982.400		
Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	6.152	4.000	143.965.700	4.000	144.433.600	4.000	144.924.900	4.000	145.440.700	4.000	145.982.400		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	6	5		5		5		5		5			
2.12.03.2.01.000 -Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9.358.200		9.826.100		10.317.400		10.833.200		11.374.900		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	6.152	4.000	9.358.200	4.000	9.826.100	4.000	10.317.400	4.000	10.833.200	4.000	11.374.900		

2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				**64.617.100**		**64.617.100**		**64.617.100**		**64.617.100**		**64.617.100**		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)**	**6**	**5**	**64.617.100**	**5**	**64.617.100**	**5**	**64.617.100**	**5**	**64.617.100**	**5**	**64.617.100**		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				**69.990.400**		**69.990.400**		**69.990.400**		**69.990.400**		**69.990.400**		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	**Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)**		**1**	**69.990.400**	**1**	**69.990.400**	**1**	**69.990.400**	**1**	**69.990.400**	**1**	**69.990.400**		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				**54.116.500**		**85.815.892**		**98.256.967**		**98.928.915**		**103.436.573**		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan**		**4**	**54.116.500**	**4**	**85.815.892**	**4**	**98.256.967**	**4**	**98.928.915**	**4**	**103.436.573**		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)				**4**		**4**		**4**		**4**			
	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**			
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				**13.163.100**		**13.821.200**		**14.512.300**		**15.237.900**		**15.999.800**		

Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		4	13.163.100	4	13.821.200	4	14.512.300	4	15.237.900	4	15.999.800		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				0		44.352.600		44.352.600		44.352.600		44.352.600		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)			0	4	44.352.600	4	44.352.600	4	44.352.600	4	44.352.600		
2.12.03.2.02.0011 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				40.953.400		27.642.092		39.392.067		39.338.415		43.084.173		
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		4	40.953.400	4	27.642.092	4	39.392.067	4	39.338.415	4	43.084.173		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				36.157.700		90.760.453		94.051.331		92.256.687		91.703.369		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentas	0	50	36.157.700	50	90.760.453	50	94.051.331	50	92.256.687	50	91.703.369	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				36.157.700		26.489.453		29.780.331		27.985.687		27.432.369		
Terkelolanya dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen kependudukan yang terkelola (Dokumen)		12	36.157.700	12	26.489.453	12	29.780.331	12	27.985.687	12	27.432.369		
	Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)		12		12		12		12		12			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				24.685.900		14.444.153		17.132.731		14.705.687		13.488.369		

Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)		12	24.685.900	12	14.444.153	12	17.132.731	12	14.705.687	12	13.488.369		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				11.471.800		12.045.300		12.647.600		13.280.000		13.944.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen		5	11.471.800	5	12.045.300	5	12.647.600	5	13.280.000	5	13.944.000		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		34.005.700		34.005.700		34.005.700		34.005.700		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			0	2	34.005.700	2	34.005.700	2	34.005.700	2	34.005.700		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		34.005.700		34.005.700		34.005.700		34.005.700		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			0	2	34.005.700	2	34.005.700	2	34.005.700	2	34.005.700		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		30.265.300		30.265.300		30.265.300		30.265.300		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			0		30.265.300		30.265.300		30.265.300		30.265.300		
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		30.265.300		30.265.300		30.265.300		30.265.300		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan			0		30.265.300		30.265.300		30.265.300		30.265.300		

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)													
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				0		100.329.621		102.392.144		97.753.424		94.788.481		
Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	0	0	0	100	100.329.621	100	102.392.144	100	97.753.424	100	94.788.481	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				0		100.329.621		102.392.144		97.753.424		94.788.481		
Tersusunnya dokumen Profil perkembangan kependudukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)			0	2	100.329.621	2	102.392.144	2	97.753.424	2	94.788.481		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				0		100.329.621		102.392.144		97.753.424		94.788.481		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)			0	2	100.329.621	2	102.392.144	2	97.753.424	2	94.788.481		